

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah politik luar negerinya, Iran telah mengalami perubahan haluan politik yang drastis. Dinamika orientasi kebijakan luar negeri Iran dari masa ke masa membuat Iran menjadi aktor yang unik di Timur Tengah. Sebelum Revolusi Islam Iran 1979, Iran yang berada di bawah kepemimpinan Shah (Raja) Mohammad Reza Pahlavi memiliki hubungan baik dengan dunia Barat terutama Inggris dan Amerika. Pasca Revolusi Islam Iran yang mengakhiri 2.500 kekaisaran Persia, kepemimpinan tertinggi Iran dipegang oleh Khomeini mulai tahun 1979 hingga 1989. Sejak saat itu, Iran mengalami perubahan sistem dan kebijakan secara menyeluruh. Dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri, Iran memiliki prinsip utama yang membentuk konsep kebijakan luar negerinya, yaitu menolak segala bentuk dominasi dari pihak asing, mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan teritorial Iran, membela hak-hak seluruh umat muslim, tidak bersekutu dengan kekuatan hegemoni, dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang menjaga perdamaian. (Ramazani, 2012, p. 9).

Sejak Revolusi Iran 1979, hubungan Iran dengan Amerika Serikat semakin memburuk. Amerika Serikat pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap Iran pada 1980, dimana Washington memberlakukan embargo ekonomi sebagai tanggapan pendudukan kedutaan Amerika Serikat di Teheran. Keadaan hubungan keduanya diperparah dengan isu sengketa nuklir Iran dan perang Iran-Irak. Amerika Serikat yang sebelumnya mendukung penuh program pengayaan uranium pada 1960-an, kemudian

berbalik mengancam Iran. Iran dianggap telah melanggar perjanjian non-proliferasi senjata nuklir yang telah ditandatangani pada 1 Juli 1968. Pengayaan uranium Iran dituding bukan untuk tujuan produksi energi namun untuk menciptakan senjata nuklir. Kemudian ketika Amerika Serikat berada pada masa pemerintahan Bill Clinton tahun 1995, Amerika Serikat melakukan embargo total terhadap Iran. Clinton memberikan instruksi kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Iran untuk mencabut saham atau investasinya dan pergi dari tanah Persia. (Madjid, 2013, p. 954) Kecurigaan Amerika Serikat kepada Iran terus berlanjut termasuk pada masa Presiden George W. Bush yang juga menganggap pengembangan nuklir Iran berpotensi menjadi pengembangan senjata nuklir.

Sikap Iran dinilai tidak kooperatif membuat negaranya didatangi oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan inspeksi terhadap pengayaan nuklir di Iran. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga tahun 2002, IAEA mendapat informasi bahwa terdapat beberapa kejanggalan dari aktivitas pengayaan yang dilakukan Iran serta adanya sebuah situs pengembangan nuklir, yakni situs Parchin yang belum teridentifikasi statusnya. Hal ini dikarenakan situs tersebut berada dalam penjagaan ketat oleh pihak militer Iran sehingga IAEA tidak mendapatkan izin melakukan inspeksi ke dalamnya. (Bhimantra, Fasisaka, & Parameswari, 2016) Sikap Iran yang tidak mau bekerjasama dengan IAEA dalam inspeksinya membuat Amerika Serikat membujuk Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi terhadap program nuklir Iran. Di bawah tekanan internasional, pada 2003 alhasil Iran mengumumkan kesediannya untuk menghentikan secara penuh program pengayaan uranium. Belum genap satu tahun sejak Iran menandatangani protokol tambahan perjanjian non-proliferasi, pada Juni 2004 Iran melanggar batas waktu yang ditetapkan Badan Energi Atom

Internasional (IAEA) untuk menyerahkan informasi terkait program nuklirnya.

Iran tetap terus melakukan pengayaan uranium hingga pada puncak sengketanya di masa kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad yang memegang jabatan presiden Iran sejak 2005 hingga 2013 justru meningkatkan produksinya, Iran melakukan pengayaan uranium hingga mencapai 20%. Angka tersebut jauh melebihi kesepakatan dalam perjanjian Non-Poliferasi yang seharusnya setiap negara hanya boleh memiliki 5% dari pengayaan uranium untuk bahan dasar tenaga nuklir. Pada tahun 2006, IAEA kembali melakukan inspeksi kepada Iran. Dari hasil inspeksi tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran. (Kasmin, 2015, p. 158) Ahmadinejad pun hingga akhir masa jabatannya terus menolak untuk menyepakati perjanjian nuklir yang dinegosiasikan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bahkan Ahmadinejad dan Amerika Serikat seringkali melakukan aksi saling kecam di depan publik.

Mencoba bertahan di tengah serangkaian sanksi internasional yang diberikan kepada Iran, Ahmadinejad menjalankan kebijakan "*Look to the East*". Kebijakan untuk berkiblat ke Timur ini diambil karena Ahmadinejad percaya hubungan luar negeri dengan negara-negara non-Barat yang bisa menerima semangat revolusi Iran dapat menjadi alternatif lain untuk mengimbangi Barat. (Amuzegar, 2005, p. 49)

Salah satu agenda dari "*Look to the East*" dalam kebijakan luar negerinya, Iran mulai melirik organisasi regional non-Barat yaitu *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO). SCO merupakan reinkarnasi dari *Shanghai Five*, yang didirikan pada tahun 1996 oleh lima negara, yaitu Cina, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan dan Tajikistan. Tujuan awal didirikannya forum Shanghai Five adalah untuk meminimalisir konflik perbatasan yang

terjadi antar negara. Kemudian forum ini memperluas kerjasama tidak hanya dalam stabilitas regional tetapi juga kerjasama ekonomi. Shanghai Five melakukan transformasi menjadi forum kerjasama internasional SCO pada tahun 2001 ditambah dengan bergabungnya Uzbekistan. Selain dari negara-negara anggota tetap SCO, organisasi ini juga menggandeng beberapa negara sebagai *observer countries* dan negara lainnya sebagai dialog partner.

Iran untuk pertama kalinya bergabung dengan SCO pada masa pemerintahan presiden Ahmadinejad tahun 2005 dengan status negara pengamat. Dengan diterimanya Iran sebagai pengamat SCO, dan partisipasinya mendapat respon baik dari negara-negara anggota SCO, Iran kemudian mencoba untuk melangkah menjadi anggota tetap SCO. Pada 15 Juni 2006, presiden Ahmadinejad dalam konferensi tingkat tinggi SCO di Shanghai mengekspresikan keinginannya untuk menjadi anggota tetap SCO. Pada tahun 2008 Iran secara resmi mendaftarkan negaranya sebagai anggota tetap melalui prosedur formal yang ditetapkan SCO. (Khodae M. A., 2013, p. 188) Namun permintaan Iran saat itu belum ditanggapi oleh SCO.

Keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap rupanya tersandung peraturan yang dikeluarkan SCO terkait syarat negara anggota tetap. Kriteria yang diumumkan SCO pada tahun 2010 memuat larangan untuk menjadi anggota tetap bagi negara yang sedang berada dibawah sanksi internasional. Peraturan tersebut menjadi sandungan bagi Iran karena saat itu Iran telah mendapat sanksi oleh PBB yang juga disahkan termasuk oleh Rusia dan Tiongkok. Iran mendapatkan sanksi oleh PBB melalui beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terkait aktivitas nuklirnya.

Setelah masa kepemimpinan Ahmadinejad berakhir, keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap di Shanghai Cooperation Organization terlihat makin serius. Di bawah

kepemimpinan Hassan Rouhani, Iran melakukan pendekatan yang berbeda dibandingkan Ahmadinejad. Arah kebijakan politik luar negeri yang ditawarkan Rouhani sejak menjabat pada 2013 hingga saat ini adalah Iran yang moderat dan meredam ketegangan dengan Barat. Rouhani menyatakan ingin lebih banyak transparansi dalam program nuklir Iran untuk membangkitkan kepercayaan dunia. Saat menghadiri KTT SCO Rouhani menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk tidak menggunakan dan mengembangkan senjata nuklir. (Weitz, 2015) Sikap Iran di masa Rouhani dinilai tidak begitu berbahaya dan berperilaku baik dalam pengembangan nuklirnya. Hal ini yang memperbesar kemungkinan penghapusan sanksi yang dijalani oleh Iran. Rencana pelepasan sanksi internasional tersebut juga didukung oleh negara-negara anggota SCO.

Kesempatan Iran bergabung dengan SCO semakin besar ketika Iran, Dewan Keamanan PBB dan Jerman akhirnya menyepakati sebuah kesepakatan bersama yang disebut *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* pada 14 Juli 2015 . Iran berjanji untuk mengizinkan pemantau internasional untuk memeriksa fasilitas nuklirnya dan langkah-langkah lain yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan energi nuklirnya adalah murni untuk tujuan damai. (Tempo.co, 20 Juli 2015) Iran akan membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang sebelumnya diterapkan oleh PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Hanya berselang 3 tahun dari pencapaian Rouhani yang membuka peluang damai dengan negara-negara yang menentang program nuklirnya, lagi-lagi Iran harus menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Pada Mei 2018 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Kemudian Trump mengumumkan penerapan kembali sanksi terkait nuklir kepada Iran pada 6 Agustus 2018. Tindakan tersebut termasuk memberlakukan kembali

sanksi terhadap sektor otomotif, perdagangan emas, logam mulia, sektor energi, transaksi minyak, lembaga keuangan asing dengan Bank Sentral Iran, dan sebagainya (Kompas.com, 7 Agustus 2018).

Negara-negara yang menyepakati perjanjian nuklir Iran termasuk negara anggota SCO seperti Rusia dan Cina menyayangkan keputusan Amerika Serikat. Rouhani menegaskan bahwa Uni Eropa bersama Cina dan Rusia harus membuat aksi nyata untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah pada skripsi ini yaitu : *“Mengapa Iran menginginkan posisi sebagai anggota tetap di Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada masa kepemimpinan Hassan Rouhani?”*

C. Landasan Teoritik

Untuk membantu penulis dalam menjawab serta menganalisa pokok permasalahan, penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan konsep dan teori yang mendukung penulisan karya tulis ini. Sehingga untuk memahami dan menganalisa keinginan Iran sebagai anggota tetap dalam SCO pada era Hassan Rouhani, penulis menggunakan konsep kebijakan politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional.

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Menurut Mochtar Kusumamaatmadja Politik Internasional pada hakekatnya merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dan kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa. Oleh karenanya, politik luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional beserta sasaran jangka

pendek dan jangka panjang (Kusumaatmadja, 1983, p. 52).

Konsep kunci dalam politik luar negeri adalah kebijakan, dimana kebijakan merupakan tindakan-tindakan, bentuk komunikasi yang diharapkan mampu mengubah atau mempertahankan perilaku negara, berakibat pada pemerintah negara tersebut, dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara, mencakup pemilihan tujuan-tujuan, memobilisasi alat-alat pencapaian tujuan tersebut merupakan implementasi atau usaha-usaha nyata dan sumber-sumber yang diperlukan untuk pencapaian tersebut. (Lentner, 1947, p. 3)

Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah ide atau gagasan atau tindakan yang dirumuskan oleh pembuat keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, melakukan perubahan dalam kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara, aktor non-negara atau lingkungan dunia. (Holsti K. J., 1995, p. 82) Faktor-faktor eksternal mempengaruhi substansi kebijakan luar negeri yang meliputi kondisi perekonomian dunia, struktur sistem internasional, kebijakan dan tindakan negara lain, hukum internasional, masalah global dan regional yang muncul dari kegiatan individual, serta opini global.

Sementara itu, faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yaitu kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, struktur pemerintahan, letak geografis, opini publik, pertimbangan etis, serta birokrasi. (Holsti K. J., 1995, pp. 271-274) Kebijakan luar negeri tersebut mencerminkan kepentingan dalam negeri nya yang juga akan dipromosikan ke luar negeri. Dengan kata lain kebijakan luar negeri suatu negara merupakan bagian dari politik dalam negerinya dan oleh karenanya kebijakan luar negeri dan politik dalam

negeri memiliki tujuan yang sama. (Dipuyudo, 1989, p. 147)

Kebijakan luar negeri Iran mengalami perubahan sesuai dengan faktor internal dan faktor eksternal pada periode tertentu. Ahmadinejad berupaya untuk bergabung dengan SCO pada masa pemerintahannya dengan pendekatan yang berbeda dengan Rouhani. Hal ini disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan nasional yang berbeda dan faktor eksternal yang dihadapi dalam dua kepemimpinan berbeda. Ahmadinejad menghadapi tekanan internasional yang sangat besar, termasuk sanksi oleh PBB terkait aktifitas nuklirnya. Sehingga SCO dipandang sebagai organisasi anti-Barat yang memiliki kepentingan untuk membendung pengaruh Barat. Iran juga berusaha meningkatkan keamanan negaranya dalam kondisi berbagai konflik Timur Tengah yang dapat menyeret Iran. Sedangkan Hassan Rouhani menjadikan SCO sebagai pemenuh kepentingan nasional berupa kepentingan ekonomi, sehingga kebijakan luar negeri yang diambil oleh Rouhani berbeda dengan Ahmadinejad. Bahkan Rouhani berhasil mencapai kesepakatan nuklir JCPOA dan menunjukkan keseriusannya dalam membenahi perekonomian Iran setelah dijatuhi sanksi bertahun-tahun.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Menurut Hans. J Morghentau, kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, hak ekonomi, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat

menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik (Wolfe, 1990, p. 115). Kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas Negara lain. (Mas' oed, 1990, p. 139)

Menurut K. J. Holsti , pada dasarnya kepentingan nasional disuatu negara mencakup empat unsur kepentingan, yaitu:

- a. *Security* (Keamanan)
Merupakan tujuan setiap negara untuk mempertahankan diri dalam arti guna melindungi warga negara, wilayah dan kedaulatan negaranya dari ancaman yang membahayakan. Ancaman tersebut tidak hanya berupa ancaman fisik seperti perang, namun meliputi hal yang mengancam penduduk, pemerintah, perekonomian maupun ideologi.
- b. *Autonomy* (Otonomi)
Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri berdasarkan prioritas pemerintah dengan segala resikonya, dan kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh, maupun ancaman dari negara lain.
- c. *Welfare* (Kesejahteraan)
Faktor kesejahteraan rakyat yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu negara. Hal ini berarti terkait pemenuhan kepentingan kesejahteraan ekonomi suatu negara.
- d. *Prestigious* (Peningkatan Status)

Keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ikut memegang peranan penting disamping pandangan lama yang menganggap bahwa kekuatan militer merupakan penilaian utama terhadap level suatu negara. (Holsti K. J., 1995, p. 137)

Dalam pembahasan mengenai keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap SCO, tentu saja memiliki agenda pemenuhan kepentingan nasional negaranya. Fokus utama pada masa Rouhani adalah mengutamakan unsur-unsur kepentingan yang telah disebutkan. Isu keamanan sebelumnya menjadi fokus utama dan paling menonjol pada pemerintah Iran pasca Revolusi Islam Iran 1979 hingga masa kepemimpinan Ahmadinejad. Hal ini disebabkan ancaman Barat yang terus membuat Iran terisolasi dari dunia Internasional dan Iran merasa perlu meningkatkan keamanan wilayahnya karena berbagai konflik di Timur Tengah serta meningkatkan status negaranya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang pengayaan uranium.

Kebijakan luar negeri Rouhani juga mementingkan unsur keamanan dalam hal menjaga kedaulatan negara, namun dengan pendekatan yang berbeda dengan era kepemimpinan sebelumnya. Rouhani menggunakan SCO sebagai platform yang mengekspresikan perdamaian, bahkan dirinya ingin mengakhiri sengketa nuklir dan memperbaiki citra di mata dunia internasional. Maka dari itu Rouhani mengekspresikan keinginannya untuk menyelesaikan sengketa nuklir, dan mencapai kesepakatan JCPOA bersama negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dan Jerman, atau P5 + 1.

Pada masa pemerintahan Hassan Rouhani, isu ekonomi merupakan hal yang *urgent*. Kebijakan luar negerinya mengarahkan Iran sebagai negara moderat

yang lebih terbuka untuk memulihkan kondisi ekonominya. Bahkan Hassan Rouhani mencapai perjanjian nuklir Iran (JCPOA) pada 2015 yang mengizinkan pemantauan fasilitas nuklir serta pemberlakuan batas pengayaan uraniumnya. Kebijakannya untuk lebih membuka diri dalam dunia Internasional dinilai dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negaranya. Serangkaian sanksi yang diterima Iran selama bertahun-tahun membuat perekonomian Iran kian mengalami krisis. Sebelumnya, tekanan dari Barat yang terus menerus dapat melemahkan perekonomian Iran, dan menimbulkan keresahan serta ketidakstabilan politik domestik. Kondisi ekonomi Iran terus merosot, seperti banyaknya angka pengangguran dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta harga-harga barang yang melonjak tinggi akibat adanya inflasi setelah diterapkannya sanksi internasional. Meski sempat dinilai membaik ketika Rouhani menandatangani JCPOA, keputusan Amerika Serikat keluar dari JCPOA beserta kecaman terhadap negara lain yang melakukan perdagangan dengan Iran dikhawatirkan kembali mengancam pemulihan Iran.

Setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir Iran, kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian Iran semakin besar. Maka dalam hal ini kebijakan luar negeri Iran dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan nasional berupa *welfare* atau kesejahteraan. Salah satu langkah pemenuhan kesejahteraan ekonomi negaranya, Iran berusaha membangun kerjasama dengan mitra-mitra lamanya seperti Cina dan Rusia dan memperluas hubungannya dengan negara lain termasuk Asia Tengah. Terlebih lagi sejak lama Iran dan Cina merupakan mitra dagang utama, termasuk dalam perdagangan minyak.

Kemudian Rusia sebagai negara dengan industri militer terbesar sekaligus memiliki

kepentingan yang sama dengan Iran karena memiliki cadangan energi berupa hampir setengah pasokan gas dunia, keduanya memiliki kendali untuk menjaga agar harga gas dunia berada di level yang semestinya. Kebijakan luar negeri Rouhani juga bertujuan memiliki hubungan yang lebih erat dengan tetangga-tetangganya, termasuk Asia Tengah. Secara historis, geografis, budaya, dan kepercayaan, Iran dan Asia Tengah memiliki banyak kedekatan. Selain itu, SCO memfasilitasi negara-negara anggotanya untuk memiliki kerjasama ekonomi yang lebih luas. Apalagi Cina dan Rusia merupakan anggota Dewan Keamanan PBB yang terikat dalam JCPOA sekaligus memegang peran penting di SCO, sehingga keberpihakan negara-negara dibutuhkan oleh Iran. Hal-hal inilah yang membuat SCO menjadi organisasi yang strategis untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan otonomi Iran.

Dengan adanya konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional yang telah dipaparkan, maka keduanya dapat disinergikan dan ditarik sebuah teori. Dimana suatu kebijakan luar negeri yang diambil dapat berubah menyesuaikan kepentingan nasional negaranya. Baik Mahmoud Ahmadinejad dan Hassan Rouhani melakukan kebijakan luar negerinya berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional yang paling mendesak pada masa pemerintahan masing-masing. Sehingga orientasi dan motif kebijakan luar negeri keduanya tentu saja dapat berbeda.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang sudah dijelaskan, maka penulis menarik sebuah hipotesa dari penelitian bahwa **Iran menginginkan posisi anggota tetap di Shanghai**

Cooperation Organisation (SCO) pada era Hassan Rouhani karena:

1. Iran memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare) negaranya melalui hubungan kerjasama yang lebih luas terutama dalam bidang ekonomi dengan negara-negara anggota SCO. Dan menyelamatkan Iran dari krisis ekonomi akibat sanksi internasional yang berlangsung bertahun-tahun.
2. Iran memiliki kepentingan otonomi untuk menahan tekanan dari Amerika Serikat. Dukungan internasional terhadap Iran dapat meningkatkan kemampuan Hassan Rouhani dalam menahan ancaman berupa penerapan sanksi kembali oleh Amerika Serikat, terutama setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran atau yang disebut *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini umumnya digunakan dalam bidang sosial dan politik guna mendapatkan hasil yang relevan karena kompleksitasnya. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisa bagian data yang ilustratif dengan mengembangkan hipotesis dan mengeksplorasi fenomena yang ada (Uwe, 2006, p. 35). Metode penelitian ini fokus pada suatu proses dan peristiwa tertentu secara interaktif dan ditambahkan unit analisa menggunakan pendekatan terhadap studi kasus. Studi kasus merupakan uraian serta penjelasan

komprehensif mengenai berbagai aspek dalam suatu penelitian untuk memaparkan fakta yang lebih empiris dan aktual.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif adalah metode dimana data yang dikumpulkan untuk melengkapi pernyataan didalam skripsi ini menggunakan kalimat yang tersusun dalam frasa dan bukan menunjukkan kalkulasi data berupa angka. Maka dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pemanfaatan karya buku secara tertulis maupun *e-book*. Dalam penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data menggunakan metode literatur dari berbagai sumber, seperti buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, koran, majalah, artikel dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan pokok bahasan skripsi.

3. Teknik Analisa

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian deskriptif analitis. Sehingga penulis kemudian menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.

4. Tujuan penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian skripsi dengan judul “Kepentingan Iran dalam Upaya Mendapatkan Keanggotaan Tetap di Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada Era Hassan Rouhani”

1. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengambilan kebijakan politik luar negeri Iran dalam upaya mendapatkan keanggotaan tetap di Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
2. Untuk mengetahui alasan pemerintah Iran yang menginginkan posisi sebagai anggota tetap dalam Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada era Hassan Rouhani.

5. Batasan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini dengan judul “Kepentingan Iran dalam Upaya Mendapatkan Keanggotaan Tetap di Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada Era Hassan Rouhani”, maka penulis memberikan batasan penelitian berupa batasan pembahasan pada tahun 2013 hingga 2018. Dalam kurun waktu tersebut terlihat upaya pemerintah Iran saat Hassan Rouhani menjabat sebagai presiden hingga saat ini untuk mendapatkan keanggotaan tetap dalam SCO.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penjabaran menjadi beberapa bab yang saling memiliki keterkaitan. Berikut adalah perumusan (lima) bab dalam karya skripsi ini ;

BAB I merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II berisi gambaran dinamika kebijakan politik luar negeri Iran. Penulis akan membahas arah kebijakan politik luar negeri Iran sebelum masa kepemimpinan Hassan Rouhani hingga dan kebijakan politik luar negeri Iran pada masa Hassan Rouhani.

BAB III berisi deskripsi SCO sebagai organisasi kerjasama internasional. Penulis akan menjelaskan sejarah perkembangan SCO hingga perannya sebagai Organisasi Internasional.

BAB IV membahas poin-poin yang tertera dalam hipotesa pada penelitian ini. Penulis akan menjabarkan alasan yang mendorong Iran menginginkan posisi sebagai anggota tetap dalam SCO

BAB V Merupakan bab penutup atau kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dijabarkan sebelumnya. Berisi mengenai ringkasan singkat, rinci dan jelas mengenai penelitian yang disusun penulis.